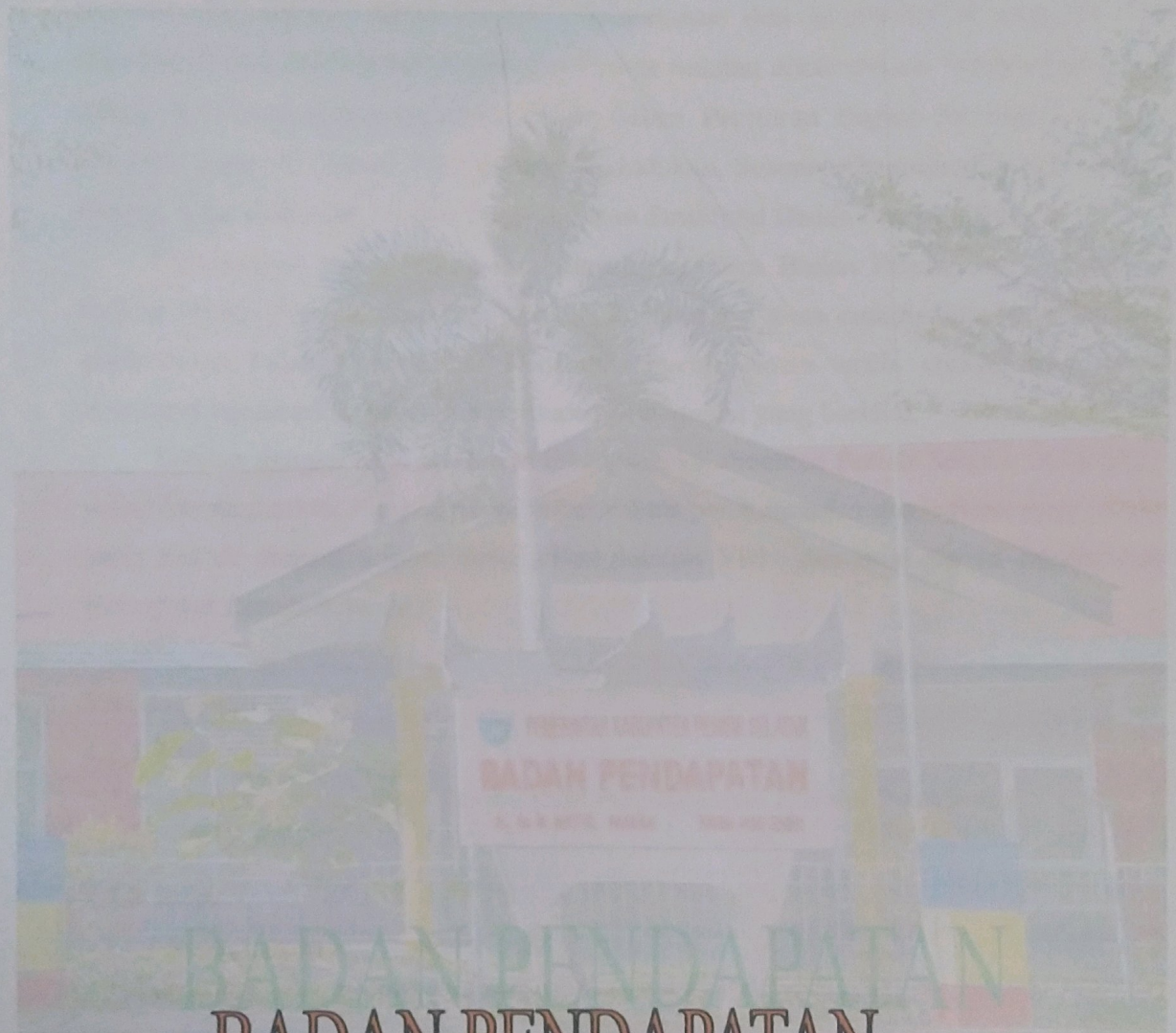


LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN



**BADAN PENDAPATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
2019**

BAB. IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 Gambaran/Kondisi Umum

Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dalam Pelaksanaan dan Implementasi program dan kegiatan Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan dilaksanakan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Pendapatan.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, maka Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan merumuskan program dan kegiatannya guna memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara tertib, efektif, transparan, akuntabel berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejalan dengan Misi ke-dua Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021 yakni Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor, maka ditetapkanlah Visi dan misi Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan.

4.2 Visi dan Misi

4.2.1 Visi

“ Terwujudnya Optimalisasi Pembiayaan Pembangunan Melalui Penerimaan PAD”

4.2.2 Misi

1. Meningkatnya Penerimaan PAD
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah
3. Efisiensi Pengelolaan Pendapatan PAD

4.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja lembaga Teknis daerah Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Bagian Tata Usaha membawahi 2 Sub Bagian, yaitu :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan
3. Bidang Pendataan dan Penetapan membawahi 3 Kepala Sub Bidang :
 - a. Kepala Sub Bidang Pendataan
 - b. Kepala Sub Bidang Penetapan
 - c. Kepala Sub Bidang Pelayanan Pajak
4. Bidang Penagihan membawahi 3 Kepala Sub Bidang :
 - a. Kepala Sub Bidang Penagihan Wilayah I
 - b. Kepala Sub Bidang Penagihan Wilayah II
 - c. Kepala Sub Bidang Penagihan Wilayah III
5. Bidang Bidang Monitoring dan Pelaporan membawahi 3 Kepala Sub Bidang
 - a. Kepala Sub Bidang Rekonsiliasi dan Pelaporan
 - b. Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi.
 - c. Kepala Sub Bidang Teknologi dan Informasi Pendapatan.

Bagan 4.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan



4.4 Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 dapat dilihat selengkapnya pada tabel di bawah ini :

NO	JENIS TENAGA	JUMLAH	PNS	HARIAN LEPAS
1	Pasca Sarjana	8	7	1
2	Sarjana	29	14	15
3	Sarjana Muda	3	1	2
4	SMA	21	2	19
5	SMP			
6	SD			
	JUMLAH	61	24	37

Jumlah total pegawai Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 sebanyak 61 orang dengan rincian PNS sebanyak 24 orang, harian lepas sebanyak 37 orang.

Jenis Pelayanan Pajak pada Badan Pendapatan terdiri dari :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Rumah Makan/Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. BPHTB
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak PBB-P2
8. Pajak Penerangan Jalan

4.5 Sumber Daya Keuangan 2018

Target Pendapatan Tahun 2018

- Target Pendapatan Asli Daerah : Rp150.064.411.839,00
- Realisasi PAD : Rp123.736.721.276,36

Pada tahun 2018 Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dengan terdiri atas Penunjang urusan yaitu Urusan Pendapatan.

Total alokasi anggaran belanja langsung yang disediakan untuk SKPD Badan Pendapatan dalam melaksanakan urusan tersebut adalah Rp3.091.954.922,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp2.985.710.807,00 atau sekitar 96,56 % dengan rincian sebagai berikut :

No	URUSAN/ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	BELANJA (Rp)		
		ANGGARAN	REALISASI	%
20. PENUNJANG URUSAN				
BADAN PENDAPATAN		3,091,954,922	2,985,710,807	96.56
A	PROG. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	636,217,246	624,033,443	98.08
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	45,189,014	42,659,764	94.40
2	Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan	228,290,000	228,260,000	99.99
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	6,821,000	6,800,000	99.69
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	34,986,711	34,930,810	99.84
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24,000,000	23,999,100	100.00
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8,454,661	6,359,000	75.21
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5,000,000	2,880,000	57.60
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	42,850,000	42,832,500	99.96
9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	149,300,000	147,394,557	98.72
10	Rapat-rapat dan Koordinasi Dalam Daerah	58,228,200	55,938,600	96.07
11	Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan	33,097,660	31,979,112	96.62
B	PROG. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	458,940,645	410,933,157	89.54
1	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	48,120,000	28,047,500	58.29
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	193,670,645	189,834,520	98.02
3	Pengadaan Pakaian Uniform BPBD	48,800,000	48,609,000	99.61

4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	35,000,000	29,646,000	84.70
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	133,350,000	114,796,137	86.09
C.	PROG. PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	39,000,000	29,822,390	76.47
1	Penyebarluasan Informasi Pembangunan	39,000,000	29,822,390	76.47
D.	PROG. PENINGK. DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1,957,797,031	1,920,921,817	98.12
1	Intensifikasi & Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	54,633,147	51,928,800	95.05
2	Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah	72,550,048	67,507,650	93.05
3	Penyusunan Laporan PAD	73,999,862	73,957,950	99.94
4	Cetak Massal dan Pengadaan bahan-bahan Dokumen PBB-P2	280,065,889	268,883,508	96.01
5	Pengadaan Barang Kuasi	127,104,000	124,836,650	98.22
6	Pendataan dan verifikasi Nomor Objek Pajak	259,394,800	251,412,722	96.92
7	Monitoring dan Evaluasi PAD	104,737,330	103,923,989	99.22
8	Pelayanan Peningkatan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah I	274,999,892	274,382,215	99.78
9	Pelayanan Peningkatan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah II	199,999,925	199,782,388	99.89
10	Pelayanan Peningkatan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah III	224,999,947	223,463,645	99.32
11	Verifikasi Penetapan Pajak Daerah	76,099,393	74,013,000	97.26
12	Pemutakhiran Nilai Jual Objek Pajak	14,272,558	13,764,000	96.44
13	Sosialisasi Pajak Daerah	97,774,800	96,755,000	98.96
14	Pemetaan Potensi Pendapatan Asli Daerah	97,165,440	96,310,300	99.12

4.6 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

4.6.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini memiliki pagu anggaran Rp636.217.246,00 realisasi Rp624.033.443,00 (98.08%).

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran bertujuan untuk penyediaan kebutuhan jasa, peralatan dan kebutuhan lainnya dalam menunjang operasional perkantoran. Program ini meliputi kegiatan kegiatan seperti :

- Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor.
- Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- Penyediaan Makanan dan Minuman.
- Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah.
- Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah.
- Penunjang operasional perencanaan dan pelaporan.

4.6.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini memiliki pagu anggaran Rp458.940.645,00 realisasi Rp410.933.157,00 (89.54 %).

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur bertujuan untuk menyediakan sarana dan prasarana berupa pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor seperti pemeliharaan gedung tempat kerja, dan bangunan-bangunan pemerintah daerah lainnya, serta pengadaan peralatan kerja seperti : komputer, mobiler dan lainnya.

Program ini dijalankan dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.
- Pengadaan Pakaian Uniform BPBD.
- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor.

- Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional.

4.6.3 Program Pengembangan Data/Informasi

Program ini memiliki pagu sebesar Rp39.000.000,00 realisasi Rp29.822.390,00 (76,47%), sumber dana APBD Kabupaten Pesisir Selatan.

Hasil/keluaran terlaksananya kegiatan Efen-efen Kabupaten Pesisir Selatan, program ini dijalankan dengan melaksanakan Kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Penyebarluasan Informasi Pembangunan

4.6.4 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini memiliki pagu anggaran Rp1.957.797.031,00 realisasi Rp1.920.921,817,00 (98.12%), sumber dana APBD Kabupaten Pesisir Selatan.

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah bertujuan mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan.

Hasil /Keluarannya terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah sesuai system dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, terencananya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sesuai dengan potensi daerah, tergalinya potensi pendapatan daerah dengan didukung sistem pemungutan pendapatan daerah yang efisien dan efektif, tercapainya realisasi penerimaan pajak daerah sesuai target yang telah ditetapkan, sehingga dapat bernilai ekonomis, berdaya guna dan dapat dipertanggungjawabkan pada kegiatan :

- Intensifikasi dan ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah.
- Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah.
- Penyusunan Laporan PAD.
- Cetak Massal dan Pengadaan Bahan-bahan Dokumen PBB-P2.
- Pengadaan Barang Kuasi.
- Pendataan dan Verifikasi Nomor Objek Pajak PBB-P2.
- Monitoring dan Evaluasi PAD.
- Pelayanan dan Peningkatan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah I.
- Pelayanan dan Peningkatan Pemungutan Pajak Dearah Wilayah II.
- Pelayanan dan Peningkatan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah III.
- Verifikasi Penetapan Pajak Daerah.
- Pemutakhiran Nilai Jual Objek Pajak.

- Sosialisasi Pajak Daerah.
- Pemetaan Potensi Pendapatan Asli Daerah.

4.7 Permasalahan dan Solusi

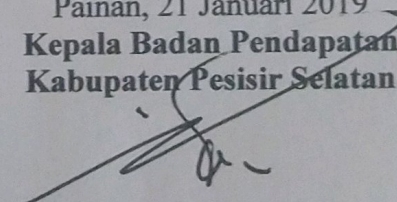
4.7.1 Permasalahan

1. Data Pajak dan Retribusi Daerah belum valid.
2. Barang milik daerah belum dimanfaatkan secara optimal dalam upaya peningkatan PAD
3. SOP terkait pengelolaan pajak dan retribusi daerah belum lengkap
4. SDM belum memadai
5. Kesadaran wajib pajak masih rendah

4.7.2 Solusi

1. Perlu dilaksanakan kegiatan verifikasi dan validasi data pajak dan retribusi daerah berupa pemetaan potensi dan zonasi.
2. Perlu dilakukan pendataan ulang terhadap Barang Milik Daerah yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan PAD.
3. Perlu dibuat SOP terkait pengelolaan pajak dan retribusi daerah agar pelayanan dapat ditingkatkan dan kebocoran PAD bisa diminimalisir.
4. Perlu dilakukan pemetaan pegawai dilingkup Badan Pendapatan dan mengikutsertakan dalam kegiatan Diklat terkait Pajak Daerah.
5. Perlu dilakukan sosialisasi peraturan pajak, serta mengintensifkan himbauan-himbauan kepada wajib pajak agar taat pajak.

Painan, 21 Januari 2019
**Kepala Badan Pendapatan
Kabupaten Pesisir Selatan**


DASRIANTO PUTRA, S.Sos, MSI
NIP.19731230 199403 1 003